

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpencil atau memencilkan diri sendirian, manusia selalu hidup berkelompok dan cenderung untuk hidup bersama. Hal ini dikarenakan kualitas hidup yang tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan untuk mempertahankan diri manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerjasama dalam suasana konflik, permusuhan, dan ketidakadilan. Hal-hal tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak dapat diwujudkan. Maka dari itu diperlukan *Ashabiyah* (kelompok solidaritas) untuk mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga keamanan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, sebab solidaritas kelompok itulah yang membuat orang untuk menyatukan usaha untuk tujuan yang sama yaitu mempertahankan diri atau mengalahkan musuh.¹

Manusia secara naluri membutuhkan kekuatan pencegah atau pemimpin dalam suatu komunitas agar mereka tidak saling menyakiti. Pemimpin semacam ini harus mempunyai kekuatan *Ashabiyah*. Jika tidak, kekuatannya tidak akan sempurna. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah simbol kekuatan dan memerintah

¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Penerjemah Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 166

dengan paksa. Jika telah meraih apa yang dicari, pemilik *Ashabiyah* akan mencari yang lebih dari itu. Jika telah menduduki kepala suku yang ditaati orang, maka jika suatu ketika menemukan jalan untuk memiliki kedaulatan lain, ia tidak mengabaikannya sebab memang demikian yang diharapkan. Namun ia akan tidak dapat meraihnya dengan mudah apabila tidak memiliki *Ashabiyah* yang menyebabkan orang lain tunduk dan patuh kepadanya. Dengan demikian kekuasaan adalah tujuan akhir *Ashabiyah*.²

Timbulnya kekuasaan karena adanya kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam diri manusia, terutama keinginannya untuk merampas hak milik orang lain. Kekurangan-kekurangan ini ada karena dalam diri manusia masih terdapat sisa kebinatangan. Namun disamping itu, manusia juga memiliki kelebihan-kelebihan yaitu pemikiran yang dipakainya untuk merenung, memikirkan dan merencanakan dan tangan yang digunakannya untuk mengubah pemikiran dan rencana itu menjadi kenyataan yang dapat diraba.

Dalam pertarungan menuju puncak Ibn Khaldun melihat bahwa peranan solidaritas atau *Ashabiyah* sangat menentukan, karena solidaritas adalah motor yang menggerakkan dan mendorong orang untuk terus maju kedepan sampai kepuncak, yaitu kekuasaan negara. Karena itu jelas kirannya bahwa konsep *Ashabiyah* juga merupakan konsep kunci dalam pemikiran Ibn Khaldun. Namun demikian, para sarjana Khalduni mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai pengertian istilah ini, terutama apabila dikaitkan dengan gejala

²Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2010), h. 422

kepolitikan yang berkembang selanjutnya. Ada diantara mereka yang menerjemahkannya dengan istilah yang lebih terbatas ruang lingkupnya seperti “hubungan darah”, “perasaan kesukuan”, “perasaan kelompok”, dan lain sebagainya. Sedangkan dari pihak lain, ada pula yang menerjemahkannya dengan istilah-istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas, seperti partai atau nasionalisme³.

Ashabiyah juga mengandung makna menurut IbnKhalidun adalah solidaritas yang ditunjukkan setiap orang terhadap keturunan dan golongannya (solidaritas kelompok). Yaitu cinta dan kasih sayang seseorang manusia kepada keluarga sedarah dan sekerabat adalah watak manusia yang dianugerahkan Allah ke dalam hamba-hambanya. Sifat ini menimbulkan rasa saling membantu dan gotong-royong serta memperbesar rasa takut musuh. *Ashabiyah* ada yang memiliki arti luas, ada juga memiliki arti sempit. Artinya *Ashabiyah* tidak hanya memiliki satu level. IbnKhalidun berkata, ketahuilah, setiap kampung atau setiap suku, disamping terikat pada keturunan mereka yang bersifat umum, mereka pun terikat pada solidaritas yang terakhir ini lebih mendarah daging daripada solidaritas keturunan yang sifatnya umum. Seperti solidaritas yang terdapat pada satu marga, pada satu keluarga, atau pada satu saudara sekandung, dan tak terdapat pada seperti saudara sepupu, baik yang dekat maupun yang jauh silsilah sepupu, baik yang dekat maupun yang jauh silsilah keturunannya. Orang-orang tersebut diatas lebih dekat pada solidaritas keturunan mereka yang sifatnya umum.

³Hermawan Sulisty, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Grafika Indah, 2004), h. 86-87.

Sebab, solidaritas keturunan yang khusus lebih terikat oleh tali persaudaraan sedarah⁴.

Dalam kaitannya dengan *Ashabiyah*, Ibn Khaldun menilai bahwa seorang pemimpin haruslah berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. Sebab dalam sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin harus bisa mengendalikan sebuah negara, menjaga ketertiban, serta melindungi negara dari ancaman musuh baik diluar maupun didalam dia membutuhkan dukungan yang kuat serta loyalitas besar dari rakyatnya. Hal ini bisa terjadi jika sipemimpin itu berasal dari sebuah kelompok solidaritas yang kuat. Dia menjelaskan bahwasanya bangunan suatu negara tersebut tidak dapat didirikan melalui aplikasi dan usaha. Dia menyatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki sejak pertama tumbuh dan berkembang hanya melalui dari sifat baik yang diterima dari keturunan dan bukan merupakan sesuatu yang berasal dari usaha suatu golongan atau sifat-sifat seseorang. Dengan demikian dia lantas berpendapat bahwa hal ini cuma diperoleh melalui keturunan saja.⁵

Atut adalah gubernur Banten saat ini dan dinasti telah menjadi gurita dalam struktur politik Banten. Posisi-posisi yang strategis banyak dipegang oleh keluarga Atut. Politik dinasti Atut menjadi ramai dibicarakan publik dan kemudian melahirkan perbincangan yang kuat dari masyarakat Banten setelah adik dari Gubernur Banten ditangkap KPK. Tubagus Chaeri Wardhana, atau yang biasa dipanggil Wawan, adik sang Gubernur tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan suap ke

⁴Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*,....., h. 420

⁵Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Penerjemah Ahmadie Thaha,....., h. 163

Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus pilkada Lebak, Banten. Dari kasus inilah masyarakat terpukul ketika mengetahui bahwa betapa mengguritanya dinasti keluarga Atut dalam pencaturan politik di Provinsi Banten. Selain Atut sendiri menjabat gubernur saat ini, beberapa anggota keluarganya, mulai dari anak-anaknya hingga adik-adik dan saudara tirinya juga menduduki pos-pos penting di stuktur pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif, baik di Banten sendiri maupun di pusat.⁶

Atas dasar tersebutlah saya tertarik membahas teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun mengenai kepemimpinan dimasa dia, dengan membandingkan teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun di Banten yang saat ini masa kepemimpinannya dilandasi berdasarkan *Ashabiyah* atau kelompok solidaritas, yang dimana semua keturunan dinasti-dinasti Banten memegang kekuasaan kepemimpinan politik lokal di Banten.⁷ Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan analisis yang mengkaji lebih dalam lagi dalam penulisan riset yang berjudul **“RELEVANSI TEORI ASHABIYAH IBN KHALDUN DALAM KEKUASAAN POLITIK LOKAL BANTEN”**

⁶Abd. Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa, 2014), h. 162

⁷Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013), h. 595

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, penulis perlu melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah. Pembatasan dalam tulisan ini terfokus pada sejauhmana Relevansi Teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan pokok masalah di atas, penulis dapat merumuskan poin-poin yang akan dikaji dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Politik Lokal di Banten?
2. Apa Faktor yang Mendorong Tumbuhnya Dinasti Politik ?
3. Bagaimana Konsep Teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun dan Relevansinya dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi politik lokal di Banten.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mendorong tumbuhnya dinasti politik.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun dan relevansinya dalam kekuasaan politik lokal Banten.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaaan Program Studi Jurusan Hukum Tata Negara dengan memperoleh gelar S.H.
2. Menambah wacana ilmu pengetahuan dan penelitian dalam teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun terhadap kekuasaan politik lokal Banten.
3. Memberikan pemahaman atau informasi terhadap masyarakat bahwa teori *Ashabiyah* dapat diterapkan sebagai sebuah konsep teori yang masih relevan untuk diterapkan sebagai kekuasaan politik lokal di Banten saat ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu.

Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
H.Epy Shaflullah	Nepotisme Menurut Tinjauan Hukum Islam (Study Pemikiran Ibn Khaldun)	Dalam UU Nomer 28 tahun 1999, <i>nepotisme</i> adalah perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan kroninya. Akan tetapi bagi Ibn Khaldun, <i>nepotisme</i> adalah <i>Ashabiyah</i> atau

		<p>solidaritas kelompok karena semua orang memiliki kebanggaan atas dasar keturunannya.</p> <p><i>Nepotisme</i> dalam arti kerjasama dan tolong menolong dalam arti guna mempermudah hasil yang akan dicapai hendaklah dijadikan suatu budaya, karena kerjasama dan tolong menolong adalah suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah swt, selama perbuatan itu sesuai dengan ruh Islam. Akan tetapi <i>nepotisme</i> dalam kesesatan harus dihindari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa <i>nepotisme</i> akan berlaku baik, bilamana orang mengartikan kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan dan sebaliknya bilamana hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi hendaknya ditinggalkan.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Ibn Khaldun mengembangkan teori tentang *Ashabiyah* (solidaritas kelompok). Teori ini dianggap orisinal milik Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun, karena pemimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan, maka seorang pemimpin harus mempunyai solidaritas kelompok yang kuat. Tanpa solidaritas kelompok, seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan dapat bertahan memimpin kelompok tersebut. Karena itu, Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa kuat dan lemahnya suatu Negara (dinasti) sangat tergantung pada perasaan solidaritas kelompok itu. Semakin tinggi *Ashabiyah*, maka semakin kuat pula dinasti tersebut. Sebaliknya bila *Ashabiyah* sudah melemah, maka dinasti atau Negara itu pun mengalami kelemahan.⁸

Berkaitan dengan kepemimpinan Ibn Khaldun menegaskan bahwa kepemimpinan terbentuk pada keturunan yang khusus dan sempit, tidak pada keturunan yang umum. Karena memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan, solidaritas kelompok yang dimiliki pemimpin harus lebih kuat dari pada solidaritas lain yang ada sehingga dia memperoleh kekuasaan dan sanggup memimpin rakyatnya dengan baik. Ibnu Khaldun melihat bahwa kepemimpinan terus akan beralih kepada orang yang solidaritas kelompoknya lebih kuat daripada orang lain.

⁸Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2010), h. 49-50

Ketika menjadi pangkal kekuatan dan kekuasaan, *Ashabiyah* pun menjadi pangkal *superioritas*, *superioritas* adalah pangkal kepemimpinan. Kepemimpinan senantiasa berada ditangan orang yang memiliki *Ashabiyah* kuat sebelum dikalahkan oleh orang yang memilikinya lebih kuat. Yang muncul pada suatu campuran hanyalah unsur yang menonjol. Kepemimpinan adalah untuk pemilik *Ashabiyah* yang unggul. Kepemimpinan yang dapat diterapkan kepada orang-orang yang memiliki *Ashabiyah* tidak dapat diterapkan kepada mereka yang bukan satu keturunan. Hanya orang-orang yang termasuk dalam *Ashabiyah* yang memiliki rumah dan kemuliaan dengan pengertian dasar dan realita⁹.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin menurut Ibn Khaldun adalah :

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang agama. Kepala negara disyaratkan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah agama, karena salah satu yang menjadi tugas seorang pemimpin adalah yang menjalankan hukum Islam sebagaimana mestinya. Hanya dengan ilmulah dirinya akan mampu menjalankan tugas tersebut.
2. Adil. Dalam setiap jabatan yang mempunyai implikasi universal, pemegangnya disyaratkan harus mempunyai sifat adil. Sedangkan jabatan negara adalah merupakan jabatan yang paling tinggi, maka logikanya sifat adil jelas sangat diperlukan sebagai syarat untuk memegang jabatan tersebut.

⁹Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*,....., h. 421

3. Mempunyai kekuatan dan kesanggupan. Syarat tersebut ditetapkan karena diantara yang menjadi tugas seorang pemimpin adalah Memelihara keamanan negara dari ancaman yang muncul dari dalam maupun dari luar. Maka sudah semestinya seorang pemimpin memiliki kekuatan (dukungan kekuatan) dan kesanggupan untuk mengatasi masalah yang tidak diinginkan yang mungkin muncul.
4. Terhindar dari bentuk kecacatan, baik fisik maupun mental yang dapat mempengaruhi pikiran dan kinerja, seperti gila, buta, kurang pendengaran, bisu atau kehilangan anggota badan lainnya. Akan tetapi apabila bentuk kecacatan tersebut tidak mempengaruhi terhadap pikiran kinerja, maka syarat terhindar dari bentuk kecacatan tersebut hanyalah merupakan syarat pelengkap atau penyempurna¹⁰.

Ashabiyah biasanya dihubungkan hanya dengan aspek material fisik. Namun, Ibnu Khaldun tidak hanya menghubungkannya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan maknawi yang berpusat pada etika dan agama. Ia berkata, “Tabiat manusia adalah mendirikan negara karena didalamnya ada implikasi-implikasi sosial. Berdasarkan fitrahnya dan kekuatan akal rasionalisnya, manusia lebih dekat kepada isi kebaikan dari pada keburukan, sebab keburukan berasal dari kekuatan-kekuatan kebintangan yang ada pada dirinya. Kekuasaan dan politik adalah milik manusia, karena keduanya khusus untuk manusia bukan binatang. Dengan demikian yang cocok dengan kekuasaan dan politik adalah kebaikan”.

¹⁰B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Serang: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam Press, 2010), h. 50-51.

Disini Ibn Khaldun mengaitkan politik dengan etika dan agama. Sementara itu, politik dan kekuasaan berkaitan dengan kebaikan. Dalam hal ini Ibn Khaldun menambahkan bahwa “Politik dan kekuasaan merupakan jaminan tuhan untuk umat manusia dan merupakan perwakilan tuhan kepada manusia untuk melaksanakan hukum-hukumnya yang berlaku untuk hamba-hambanya. Dan hukum-hukum Allah itu tidak lain hanya untuk kebaikan dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatannya. Hal ini diperlihatkan oleh syariat Islam bahwasannya barangsiapa memperoleh *Ashabiyah* berdasarkan jaminan kekuasaan tuhan, dan siapa diberi tuhan sifat-sifat baik yang sesuai untuk kebutuhan melaksanakan hukum-hukum Allah yang berlaku pada ciptaannya, orang tersebut telah mempunyai persiapan untuk menerima tugas khilafah dari tuhan dan menjadi penjamin terhadap umat manusia”.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa gerakan keagamaan tanpa *Ashabiyah* tidak akan sempurna. Alasannya, rakyat hanya bisa digerakan dan bangkit bertindak berkat dorongan *Ashabiyah*. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan “Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali ia berada dalam penjagaan kaumnya”. Demikian yang terjadi dengan para nabi yang sudah jelas merupakan manusia-manusia paling mulia dan memiliki kelebihan. Bagaimana manusia biasa yang tak mempunyai kelebihan seperti mereka akan sukses tanpa *Ashabiyah*. Maknanya, agama mengokohkan *Ashabiyah*. Namun, agama sendiri tidak akan tegak tanpa *Ashabiyah*¹¹.

¹¹Rosihon Anwar, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*,..., h. 423-424.

Solidaritas sosial hanyalah didapati pada golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti sama. Hal ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan umat manusia, yang membuat mereka ikut merasa setiap kesakitan yang menimpa kaumnya. Orang membenci penindasan terhadap kaumnya, dan dorongan untuk menolak tiap kesakitan yang mungkin menimpa kaumnya itu adalah sesuai dengan kodratnya dan tertanam pada dirinya.

Apabila tingkat kekeluargaan antara dua orang yang bantu-membantu itu dekat sekali, maka jelaslah bahwa ikatan darah sesuai dengan buktinya yang membawa kepada solidaritas yang sesungguhnya. Apabila tingkat kekeluargaan itu jauh, maka ikatan darah itu sedikit lemah, tetapi sebagai gantinya timbullah perasaan ke familial yang didasarkan pada pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan.¹²

Kerajaan atau dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas kelompok. Sebagaimana telah ketahui, kemenangan terdapat dipihak yang mempunyai solidaritas yang kuat, dan yang anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama.

Kedudukan suatu raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kekayaan duniawi, dan juga kepuasan lahir dan batin. Karena itu, ia menjadi sasaran perebutan, dan jarang sekali

¹²Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadie Thaha,...., h. 151-152

dilepaskan dengan suka rela, sebaliknya, selalu dibawah paksaan. Perebutan membawa kepada perjuangan dan peperangan, dan runtuhnya singgasana-singgasana. Kesemuannya itu tidak bisa terjadi kalau tidak dengan solidaritas kelompok.

Hal-hal semacam itu biasanya tidak diketahui atau dilupakan oleh rakyat, yang tidak lagi ingat waktu dinasti itu pertama ditegakkan, hanya mereka itu telah dibesarkan, keturunan dari keturunan demi keturunan dalam suatu tempat tertentu di bawah kekuasaan dinasti itu. Mereka tidak tahu sama sekali bagaimana Allah mendirikan dinasti itu. Apa yang mereka saksikan hanyalah raja-raja mereka, yang kekuatannya telah berdiri teguh dan utuh dan tidak lagi menjadi soal yang dipertentangkan, dan tidak lagi merasa perlu mendasarkan pemerintahannya kepada solidaritas kelompok. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan itu terjadi pada mulanya dan kesukaran apa yang harus dihadapi oleh para pendiri dinasti itu¹³.

Salah satu lagam politik di daerah yang sekarang ini muncul ke permukaan dan melahirkan polemik dalam kancah politik nasional adalah politik dinasti. Fenomena politik dinasti yang sekarang ini muncul utamanya seiring terkuaknya praktik politik di Banten. Bahwa politik Banten kini dikuasai oleh keluarga Atut Chosiyah.¹⁴

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis Deskriptif Kualitatif. Artinya

¹³Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadie Thaha,....., h. 187-188

¹⁴Abd. Halim, *Politik Lokal*,....., h. 162

metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas¹⁵. Yang nantinya menjadi bahan materi untuk dibahas. Metode ini digunakan untuk mendapat dan mengetahui Relevansi Teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian ini. Maksud dari penelitian kepustakaan (*Libray Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Mengingat obyek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan penelitian ini menggunakan metode historis. Karena materi ini berkesinambungan dengan historis maka perlu dilihat benang merahnya dalam pengembangan pikiran tokoh yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*,..., h. 97-99.

3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Adapun rincian masing-masing sumber yaitu :

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data dari tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yakni penelitian kepustakaan (*Libray Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut¹⁸. Pengumpulan metode data ini dengan cara mengumpulkan data-data dari buku dan

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91

¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*,..., h. 97

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap penelitian hasil temuannya. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode analisis Deskriptif Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas¹⁹. Dan metode penelitian dalam pendekatan kualitatif (*Qualitative*) yang artinya bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik.²⁰

6. Teknik Penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2016.

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,*, h. 66

²⁰ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.39

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini di bagi atas dasar (5) lima bab pembahasan, dengan perincian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Biografi Ibn Khaldun, yang terdiri atas riwayat hidup Ibn Khaldun, pendidikan Ibn Khaldun, dan karya-karya Ibn Khaldun.
- BAB III : Tinjauan teoritis tentang *Ashabiyah*, yang terdiri atas pengertian *Ashabiyah*, tujuan *Ashabiyah*, dan peran *Ashabiyah*.
- BAB IV : Relevansi Teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten, yang terdiri atas kondisi politik lokal Banten, faktor yang mendorong tumbuhnya dinasti politik, dan teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun relevansinya pada kekuasaan politik lokal Banten.
- BAB V : Penutup berisi kesimpulan dan saran.